

KINERJA DAN PROSPEK PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERTANIAN NASIONAL

Performance and Development Prospect of Agroindustry in National Agricultural Development Perspective

Maesti Mardiharini¹ dan Erizal Jamal²

¹ Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Jl. Tentara Pelajar 10 Bogor

² Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161

Naskah masuk : 21 Oktober 2011

Naskah diterima : 30 Januari 2012

ABSTRACT

This paper discusses agricultural development in South Kalimantan Province. It is observed that relatively slow agribusiness development in this province is due to limited infrastructure and not focused implementation. The Regional Government of South Kalimantan identifies 17 types of potential agroindustry in which all of them are unfinished, partially developed. Opportunity for agribusiness development is promising along with improved access of processed products to domestic market and some attempts to promote local products consumption. It is strengthened by the targets established by the government for agribusiness development acceleration and more integrated regional development. It is necessary to have a rural development reorientation as the basis of agroindustry development. It also enhances individuals' opportunity to improve their capacities along with the agricultural industrialization spirit.

Key words: *agroindustry, added value, rural development, South Kalimantan*

ABSTRAK

Selama tiga dekade terakhir pengembangan agroindustri di perdesaan relatif tidak banyak mengalami kemajuan. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, diantaranya karena produk pertanian yang tersebar dan multi kualitas. Selain itu sumberdaya manusia yang ada belum sepenuhnya secara kreatif terbiasa dalam pengembangan kegiatan yang memacu upaya peningkatan nilai tambah, ditambah lagi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan tidak tuntas. Tulisan ini diarahkan untuk menelaah pembangunan agroindustri di Kalimantan Selatan. Dari kasus Kalimantan Selatan terlihat bahwa penyebab lambatnya perkembangan agroindustri diantaranya karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur, serta tidak fokusnya pengembangan yang dilakukan. Pemerintah daerah mengidentifikasi 17 jenis agroindustri unggulan, yang semuanya dikembangkan secara parsial dan dalam skala kecil. Peluang pengembangan ke depan sangat terbuka, terlebih dengan makin terbukanya pasar bagi produk olahan di dalam

negeri dan berbagai upaya untuk mengutamakan konsumsi produk lokal. Keadaan ini diperkuat dengan berbagai target yang dikembangkan pemerintah bagi percepatan pengembangan agroindustri serta pengembangan wilayah yang semakin terintegrasi. Diperlukan adanya reorientasi pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagai basis pengembangan agroindustri, yang membuka peluang setiap individu mengembangkan kapasitasnya yang sejalan dengan semangat industrialisasi pertanian, serta lingkungan yang mendukung pengembangan agroindustri secara tuntas dan sistematis.

Kata kunci : *agroindustri, nilai tambah, pembangunan perdesaan, Kalimantan Selatan*

PENDAHULUAN

Pengertian agroindustri dalam makalah ini adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interlasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan pembinaan. Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri dengan demikian mencakup Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP), Industri Peralatan Dan Mesin Pertanian (IPMP) dan Industri Jasa Sektor Pertanian. (Wikipedia, 2011).

Perhatian terhadap pengembangan agroindustri di Indonesia sudah ada sejak awal pembangunan Orde Baru, utamanya pada Pembangunan Lima Tahun kedua (1974-1979). Pada tahap ini pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang pertanian (agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam. Dalam pelaksanaannya, pengembangan agroindustri belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang direncanakan. Menurut Sudaryanto dan Munif (2005), pendekatan pembangunan pertanian selama pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dengan pendekatan komoditas. Pendekatan ini dicirikan oleh pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan pengembangan komoditas secara parsial dan lebih berorientasi pada peningkatan produksi dibanding peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Akibat kenyataan di atas peningkatan produksi pertanian menimbulkan kecenderungan menurunnya harga produk pertanian yang berakibat negatif pada

pendapatan petani. Hasil penelitian Ratnawati *et al.* (2004), menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian menurunkan harga output di tingkat petani berkisar antara 0,28-10,08 persen dan menurunkan pendapatan rumah tangga pedesaan berkisar antara 2,10-3,10 persen. Satu hal yang khas selama pemerintahan Orde Baru adalah sektor pertanian berkembang dalam kebijaksanaan yang protektif, memerlukan subsidi dan intervensi yang sangat mendalam, sehingga sektor pertanian dianggap sebagai *most-heavily regulated*.

Selama pemerintahan reformasi keadaan tidak banyak berubah, dan pengembangan agroindustri belum banyak menunjukkan kemajuan yang berarti. Makalah ini mencoba mengupasnya dalam perspektif pembangunan pertanian nasional, serta berbagai program besar yang dirancang secara nasional. Bahasan akan dimulai dengan melihat bagaimana pembangunan agroindustri dilaksanakan selama ini, serta kondisi riil yang ada secara nasional dan wilayah, terutama yang ada di Kalimantan Selatan. Berbagai hasil yang dicapai ini akan dikupas terkait pra-syarat bagi terlaksananya suatu pengembangan agroindustri yang baik, dikaitkan dengan berbagai rencana pembangunan pertanian dan pembangunan wilayah ke depan. Pada akhirnya akan disampaikan beberapa pemikiran ke depan.

PEMBANGUNAN AGROINDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Pembangunan pertanian selama satu dekade terakhir lebih identik dengan pembangunan komoditi, dengan fokus perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri. Fokus perhatian berbagai pihak, baik yang ada di Kementerian Pertanian (Kementan) ataupun di luar Kementan, lebih pada upaya peningkatan produksi, dengan upaya melalui ekstensifikasi, intensifikasi serta diversifikasi.

Secara nasional Kementerian Pertanian meluncurkan beberapa program, baik itu dalam bentuk gerakan masal melalui sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) untuk padi, maupun upaya sporadis lainnya berdasarkan komoditi : perkebunan (Kimbun, gernas kakao dan lainnya) peternakan (swasembada daging sapi/PSDS) serta pengembangan kawasan hortikultura.

Terkait dengan pengembangan wilayah berbagai pendekatan dalam memacu upaya peningkatan produksi dilakukan, salah satunya melalui Agropolitan. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, melalui dampak *multiplier effect* dan difusi hasil pembangunan. Dalam pelaksanaannya, *multiplier effect* dan difusi tidak sepenuhnya terjadi, karena hal ini mensyaratkan kesenjangan ekonomi dan sosial relatif rendah pada masyarakat dan setiap anggota masyarakat memiliki akses yang seimbang terhadap sumberdaya produktif. Karena tidak dipenuhinya pra-syarat awal,

pelaksanaan agropolitan menciptakan ketimpangan baru dalam masyarakat pedesaan.

Upaya ke arah peningkatan kesejahteraan petani belum banyak mendapat perhatian, termasuk pengembangan agroindustri, sebagai salah satu andalan yang diharapkan dapat memacu peningkatan nilai tambah dan membuka pintu bagi peningkatan kesejahteraan petani. Kurang berkembangnya kegiatan agroindustri menyebabkan peningkatan produktivitas dan produksi, tidak selalu dibarengi atau diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani, bahkan pendapatan petani cenderung menurun, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Siregar (2003) bahwa secara riil tingkat kesejahteraan petani dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh nilai tukar petani (NTP) yang mempunyai tendensi (*trend*) yang menurun (negatif) sebesar $-0,68$ persen per tahun.

Bila dilihat secara nasional, peranan sektor agroindustri dalam penciptaan nilai tambah dan devisa masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor non agroindustri. Hasil penelitian Supriyati *et al.* (2006) mengindikasikan bahwa pertumbuhan output/nilai tambah pada sektor agroindustri tidak diikuti oleh pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 1995, nilai tambah dari seluruh sektor perekonomian mencapai Rp. 538,88 trilyun, dan meningkat menjadi Rp. 1.342,39 trilyun pada tahun 2000 atau rata-rata meningkat 29,82 persen per tahun. Pada tahun 2000, sektor agroindustri menyumbang nilai tambah sebesar Rp. 173,58 trilyun atau 12,73 persen. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan industri non agro yang menyumbang sebesar Rp. 209,17 trilyun atau 15,34 persen. Jika dirinci menurut sektor binaan Departemen Pertanian, sektor agroindustri pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan) memberikan sumbangan sebesar Rp. 125,38 trilyun atau 9,19 persen. Sementara itu agroindustri kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan 5,07 persen dan 1,12 persen terhadap nilai tambah perekonomian nasional.

Bila dilihat dari skala usaha industri skala besar yang jumlahnya kurang dari 1 persen, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 19 persen, menguasai nilai tambah sekitar 84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa industri skala besar bersifat padat modal. Sementara itu, industri skala sedang, kecil dan rumah tangga yang penyerapan tenaga kerja mencapai 81 persen hanya mampu menciptakan nilai tambah 14 persen (Supriyati *et al.*, 2006).

Pada tahun 2004 terdapat sekitar 34,42 juta unit usaha yang terdiri dari 2.000 unit usaha besar (konglomerasi), 37.000 unit usaha menengah dan selebihnya adalah unit usaha kecil. Usaha kecil tersebut, sebagian besar bergerak di bidang pertanian yakni 21,2 juta unit usaha atau 64 persen dari seluruh usaha kecil, bidang perdagangan 6,8 juta atau 17 persen dan bidang industri manufaktur 2,5 juta unit usaha atau 7,5 persen. Dari 33.381.000 unit usaha kecil hanya

menguasai 33,9 persen PDB, sedang dari 2.000 usaha besar ternyata telah menguasai 61,1 persen PDB, dan sisanya sekitar 5 persen PDB dikuasai 37.000 unit usaha menengah (Djamhari, 2004).

Perkembangan usaha agroindustri di perdesaan tidak menunjukkan hal yang menggembirakan. Selama tahun 1998-2006, kemampuan sektor agroindustri menyerap tenaga kerja di perdesaan tidak menunjukkan perubahan yang berarti, kegiatan agroindustri yang banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha pengolahan. Kegiatan ini umumnya dalam skala mikro, dengan pekerja keluarga serta lemah modal dan manajemen dan 40 persen lokasi usaha tidak permanen (Suhariyanto, 2007).

Dalam kajian yang lebih mikro di Kalimantan Selatan, Antarlina dan Umar, (2006) melihat pengembangan agroindustri belum didukung oleh penyediaan peralatan memadai serta sumber daya manusia yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan agroindustri. Agroindustri unggulan Kalimantan Selatan menurut Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan terdiri dari 17 jenis (Masriah, 2009), yaitu : (1) Minyak Kelapa (Kabupaten Hulu Sungai Selatan); (2) Kopi Bubuk (Kabupaten Hulu Sungai Tengah); (3) Gula Merah (Kabupaten Banjar); (4) Ikan Asin (Kabupaten Barito Kuala); (5) Dodol (Kabupaten Hulu Sungai Selatan); (6) Kerupuk Ikan (Kabupaten Kotabaru); (7) Kacang/Emping (Kabupaten Hulu Sungai Tengah); (8) Pengolahan Buah (Kota Banjarbaru); (9) Dendeng Itik (Kabupaten Hulu Sungai Utara); (10) Tepung Beras/Ketan (Kota Banjarmasin); (11) Kerupuk Itik (Kabupaten Hulu Sungai Utara); (12) Kripik Tempe (Kota Banjarbaru); (13) Kripik Nangka (Kota Banjarbaru); (14) Pengolahan Nata De Coco (Kota Banjarbaru); (15) Sale Pisang (Kabupaten Tapin); (16) Pengolahan makanan ternak (Kabupaten Banjar); dan (17) Pengolahan tepung sagu (Kabupaten Kotabaru). Usaha yang dikembangkan umumnya dalam skala rumah tangga dengan tenaga kerja keluarga. Berdasarkan data statistik industri 2009, ada 42.351 unit usaha dengan tenaga kerja 101.441 orang atau 2-3 tenaga kerja untuk setiap industri. Sumbangan usaha pengolahan termasuk agroindustri di dalamnya, hanya sekitar 10 persen terhadap total Produk domestik Regional Bruto Kalsel (BPS Kalsel, 2009).

PELUANG PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

Peluang pengembangan agroindustri ke depan di Kalimantan Selatan terbuka sangat lebar. Hal itu berkaitan dengan rencana pembangunan pertanian ke depan yang salah satunya menargetkan terjadinya peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, target ini mengait erat dengan pengembangan agroindustri. Target lainnya adalah (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, dan (3) Peningkatan

Kesejahteraan Petani. Semua target di atas akan dicapai melalui tujuh Gema Revitalisasi 1. Revitalisasi Lahan 2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan 3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 4. Revitalisasi Sumber Daya Manusia 5. Revitalisasi Pembiayaan Petani 6. Revitalisasi Kelembagaan Petani 7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Manufacturing Practices*). Pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar olahan. Saat ini, sekitar 80 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar sedangkan 20 persen dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan. (Kementerian Pertanian, 2010).

Sejalan dengan rencana di atas pemerintah juga merencanakan penerapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang dilaksanakan melalui 4 pendekatan, yaitu melalui (1) peningkatan *Value Added*; (2) memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya; (3) mendorong Inovasi; dan (4) mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional. Perencanaan ini merupakan komplementer terhadap berbagai perencanaan yang ada dan lebih bersifat terobosan.

Upaya terobosan ini membagi wilayah pengembangan di Indonesia dalam 6 koridor pengembangan, dan untuk Kalimantan diarahkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, dengan fokus komoditi Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bauksit, Migas, Perkayuan, Besi-Baja (Gambar 1). Upaya ini diharapkan dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman. Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui *inter-modal supply chain systems*. Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (Menko Perekonomian, 2011).

Diharapkan melalui pembangunan sektoral yang fokus pada pengembangan komoditi secara terintegrasi, dan adanya terobosan yang membuka isolasi wilayah melalui MP3EI, diharapkan akan terjadi percepatan dalam pembangunan wilayah, termasuk agroindustri.



Gambar 1. Enam Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Potensi dan Peluang Pengembangan Ke Depan, 2011-2025

KENDALA PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

Kendala utama dalam pengembangan agroindustri di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan adalah, pengembangan yang dilakukan belum terintegrasi dalam suatu upaya bersama yang saling mendukung. Pendekatan pembangunan yang lebih berat ke arah pembangunan sektoral, menyebabkan berbagai upaya yang telah dikembangkan bersifat parsial dan tidak tuntas. Kementerian Pertanian sebagai aktor utama dalam pengembangan kegiatan agroindustri, perannya hanya sekitar 20 persen untuk ketuntasan suatu kegiatan, sekitar 80 persen sangat tergantung dari dukungan sektor lain.

Secara umum agar pengembangan agroindustri dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan beberapa pra-syarat, sebagai pra-kondisi bagi pengembangannya. Kalau kita lihat lagi apa yang diungkapkan Mosher (1966) dalam literatur klasik *"Getting Agriculture Moving"*, maka apa yang dimaksudkannya sebagai syarat pokok dan syarat pelancar, merupakan salah satu syarat keharusan bagi pengembangan agroindustri di suatu wilayah. Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi: (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani; (2) teknologi yang senantiasa berkembang; (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal; (4) adanya perangsang produksi bagi petani; dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian meliputi: (1) pendidikan pembangunan; (2) kredit produksi; (3) kegiatan gotong royong petani; (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian; dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Syarat keharusan kedua, dalam pengembangan agroindustri, harus saling mengait dan mendukung dalam satu alur agribisnis. Agroindustri harus dipandang sebagai suatu sistem yang saling mengait, mulai dari arus bahan baku pertanian sampai ke prosesing dan kemudian ke konsumen. Keterkaitan ini perlu didukung oleh kelembagaan, dalam bentuk tata aturan dan organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dalam mata rantai agribisnis. Keterkaitan ini mampu memberikan nilai tambah terhadap produk pertanian yang dihasilkan petani (Suprpto, 2011).

Syarat keharusan ketiga pengembangan agroindustri harus dapat menyiasati tiga karakteristik utama dari produk pertanian, yaitu bersifat musiman (*seasonality*), mudah rusak (*perishability*), dan beragam (*variability*) kualitasnya. Komponen biaya bahan baku umumnya merupakan komponen terbesar dalam agroindustri, sehingga pengadaan bahan baku sangat menentukan keberlanjutan agroindustri. Selain itu pengembangan agroindustri harus dapat memperpanjang kesegaran produk yang dihasilkan petani, dan dapat dikembangkan pada bahan baku yang beragam kualitasnya.

Syarat keharusan di atas tidak memadai dalam mendukung pengembangan agroindustri di suatu wilayah. Keberhasilan pengembangan agroindustri perlu didukung oleh adanya syarat kecukupan, yang meliputi adanya suatu pendekatan yang terpadu lintas sektoral dalam memenuhi semua syarat keharusan di atas, serta adanya pengembangan sumberdaya manusia yang sejalan dengan semangat pertanian industrialis.

REORIENTASI PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

Ada persepsi keliru di sebagian pengambil kebijakan di negeri ini yang menganggap pembangunan perdesaan identik dengan pembangunan pertanian, sehingga tanggung jawab utama pembangunan perdesaan ada pada kementerian teknis seperti Pertanian dan Perikanan. Pada kenyataannya penghasilan masyarakat desa yang berasal dari kegiatan pertanian terus menunjukkan penurunan, untuk penduduk desa di Jawa misalnya, kontribusi sektor pertanian dalam pendapatan keluarga menurun dari 49,8 persen pada tahun 1995 menjadi hanya 25,2 persen tahun 2007. Untuk petani padi sumbangan sektor pertanian terhadap penghasilan keluarga malah lebih kecil lagi hanya sekitar 19,0 persen (Jamal, 2008; Sumaryanto dan Sudaryanto, 2009). Persepsi yang keliru ini menyebabkan pembangunan perdesaan berada dalam kondisi sulit, dimana kegiatan pertanian dalam arti budidaya relatif stagnan, sementara kegiatan agroindustri juga tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti, terutama dalam menciptakan peluang usaha yang lebih beragam.

Ke depan diperlukan reorientasi dalam pendekatan pembangunan desa. Hal yang utama adalah, merubah pendekatan yang bersifat sektoral menjadi

pendekatan pembangunan wilayah, dan untuk itu diperlukan perubahan paradigma pendekatan pembangunan pada semua level, dimulai dari tingkat pusat. Adanya undang-undang tentang pembangunan desa, merupakan dasar yang diperlukan bagi terlaksananya koordinasi dalam pendekatan pembangunan desa. Pada tataran praktis sinergi dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sangat terkait dengan sistem pembiayaan pembangunan. Koordinasi dan sinergi akan dilakukan bila sejak awal semua komponen pembiayaan yang ada telah dirancang terlaksananya koordinasi dan sinergi tersebut.

Pembangunan desa diarahkan untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia yang ada, selaras dengan peningkatan daya dukung sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah. Pengembangan sumberdaya manusia difokuskan agar setiap individu anggota masyarakat di perdesaan, memiliki peluang untuk merubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik, melalui pengembangan usaha yang beragam sesuai daya dukung sumberdaya alam yang ada di perdesaan. Pengembangan usaha yang beragam ini, dengan penekanan kepada upaya peningkatan daya saing dan nilai tambah, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada usaha yang berbasis lahan di perdesaan.

Terkait dengan sumberdaya manusianya, pengembangan sumberdaya manusia, harus selaras dengan semangat industrialisasi perdesaan atau pertanian industrialis (Pakpahan *et al.*, 2005). Sumberdaya manusia yang sejalan dengan upaya industrialisasi itu dicirikan oleh : (1) pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan atau tradisi; (2) kemajuan teknologi merupakan instrument utama dalam pemanfaatan sumber daya; (3) mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; (4) efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumber daya dan karenanya membuat hemat dalam penggunaan sumber daya; (5) mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana sekaligus tujuan; (6) profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; (7) perekayasa merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Secara lebih detail, strategi yang perlu dilakukan adalah :

1. Penataan berbagai data dukung pembangunan perdesaan, terutama yang terkait kondisi sumberdaya manusia yang ada, serta penguasaan dan akses pada asset dan sumberdaya lainnya, menjadi upaya awal yang perlu dilakukan, sehingga perencanaan yang dilakukan dapat lebih komprehensif dan realistis.
2. Data dasar yang ada dijadikan basis dalam menyusun *grand strategy* pembangunan desa, yang bersifat antisipasi terhadap perkembangan dalam berbagai lingkungan strategis, terutama dalam kaitannya dengan gerakan atau perpindahan penduduk. Pengembangan konsep ini harus sejalan dengan upaya pengembangan wilayah perkotaan, dan menjadi rujukan semua pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pengembangan sumberdaya manusia harus dapat menjangkau semua komunitas yang ada di perdesaan. Kelompok yang saat ini bekerja di pertanian misalnya, harus dipilah berdasarkan penguasaan lahan dan arah pengembangannya ke depan, apakah semuanya akan tetap pada kegiatan budidaya saja, atau memang ada yang siap untuk mengembangkan kegiatan agroindustri. Bagi yang akan mengembangkan agroindustri, diidentifikasi ketrampilan apa yang harus dimiliki, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang lain yang ada di sekitarnya atau peluang yang diciptakan pemerintah bagi mereka di luar usaha budidaya pertanian.
4. Perencanaan dibuat jelas dalam berbagai skala waktu dan adanya kesamaan visi pada semua level pemerintahan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kerja bersama di perdesaan untuk penanganan yang menyeluruh permasalahan yang ada, terutama kesiapan dalam memfasilitasi pengembangan agroindustri, serta dukungan sistem pembiayaan yang kondusif bagi pengembangan nilai tambah produk pertanian.

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai dengan empat target di atas, serta pengembangan koridor ekonomi untuk wilayah Kalimantan, harus dapat disinergikan dalam memacu pembangunan perdesaan dan wilayah. Kedua upaya ini harus dapat menciptakan peluang bagi upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang ada, serta menciptakan peluang usaha baru di perdesaan utamanya agroindustri.

Agar upaya ini bisa terwujud diperlukan perubahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, yang meliputi : (i) pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui pendekatan terpadu, dengan penekanan pada penyiapan sumberdaya manusia untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, di luar kegiatan budidaya pertanian; (ii) pemerintah perlu mendorong desa-desa model di setiap kabupaten, yang memperlihatkan penumbuhan usaha agroindustri melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, serta membuka peluang dilakukannya penataan penguasaan dan pengusahaan lahan di tingkat petani.

Pemerintah pusat perlu mendukung upaya ini dengan memberikan alokasi dana khusus pada desa-desa yang pembangunannya dilaksanakan secara terpadu, yang diawali dengan penataan proses pendataan serta penyempurnaan infrastruktur yang ada, dan secara bertahap mendukung upaya pengembangan usaha peningkatan nilai tambah.

Dalam jangka panjang perlu dibangun suatu mekanisme penilaian kemajuan suatu desa, dengan basis utama penilaian berdasarkan kemajuannya

dalam penciptaan usaha agroindustri, serta perbaikan dalam penguasaan dan pengusahaan lahan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Antarlina, S.S. dan S. Umar. 2006. Teknologi Pengolahan Komoditas Unggulan Mendukung Pengembangan Agroindustri DI Lahan Lebak. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Pengembangan Terpadu Lahan Rawa Lebak. Balai Penelitian Rawa. Banjar Baru.
- BPS Kalsel. 2009. Kalimantan Selatan dalam angka Tahun 2009. BPS Kalimantan Selatan. Banjarmasin.
- Djamhari, C. 2004. Orientasi Pengembangan Agroindustri Skala Kecil dan Menengah; Rangkuman Pemikiran. Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004. http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2025/agroindustri.pdf. Dikutip 9 Juni 2011, pukul 19.11 WIB.
- Jamal, E. 2008. Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi 26(2):92-102. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Pembangunan Pertanian 2010-2014. Kementan. Jakarta.
- Masriah. 2009. Agro-industri Regional sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nomor 1 Tahun 14, Maret 2009. FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Menko Perekonomian. 2011. Penjelasan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025. Musrengbangnas. Jakarta, 28 April 2011.
- Mosher, A.T. 1966. Getting agriculture moving. The Agricultural Development. Council, Inc. New York.
- Pakpahan, A., H. Kartodihardjo, R. Wibowo, H. Nataatmadja, S. Sadjad, E. Haris & H. Wijaya. 2005. Membangun Pertanian Indonesia: Bekerja Bermartabat dan Sejahtera. Edisi kedua Maret 2005. Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ratnawati, A., R. Oktaviani dan Sahara. 2004. Dampak Restrukturisasi Perbankan dan Peningkatan Produktivitas Pertanian terhadap Kinerja Ekonomi Makro, Sektor Pertanian, dan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Laporan akhir hibah bersaing XI/3 Tahun Anggaran 2003/2004. Faperta. IPB Bogor.
- Siregar, H. 2003. Change in Farmer Terms of trade and Agricultural Net_barter Term of Trade: An Empirical Analysis. Jurnal Manajemen dan Agribisnis. 1(1):1-19.
- Sudaryanto, T. dan A. Munif. 2005. Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian. Agrimedia. 10 (2):6-13. IPB Bogor.

- Suhariyanto, K.2007. Kinerja dan Perspektif Kegiatan non-Pertanian dalam Ekonomi Perdesaan. Prosiding Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat (Editor Suradisastra *et al.*). Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Suprpto. 2011. Karakteristik, Penerapan, dan Pengembangan Agroindustri Hasil Pertanian di Indonesia. Staf Pengajar Fak. Manajemen Agribisnis Universitas Mercu Buana. http://research.mercubuana.ac.id/proceeding/PENERAPAN_DAN_PENGEMBANGAN_AGROINDUSTRIAL.pdf. Dikutip 6 Juni 2011, pukul 16.30.
- Supriyati, A. Setyanto, E. Suryani, dan H. Tarigan. 2006. Analisis Peningkatan nilai Tambah Melalui Pengembangan Agroindustri di Perdesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Sumaryanto & T. Sudaryanto. 2009. Perubahan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan : Analisis Data Patanas Tahun 1995 dan 2007. Prosiding Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani (Editor Suradisastra et.al. 2009) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor
- Wikipedia. 2011. Pengertian Agroindustri. <http://id.wikipedia.org/wiki/Agroindustri>. Dikutip 6 Juni 2011, pukul 16.30 WIB.